



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA LEIDA.M
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 907524

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.400.000.000**

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
4. Tanah Seluas 21.312 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 2.020.000.000
5. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
8. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 923.500.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



80.000.000

4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

75.000.000

5. MOTOR, HONDA BIT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

6. MOTOR, HONDA BIT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

7. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

1.777.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

9.100.500.000

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

9.100.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.